

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu dibutuhkan dana yang besar. Pemerintah sebagai pengatur dan administrator penuh dalam setiap daerah baik provinsi, kota, maupun kabupaten dan harus dapat menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan dapat dengan sendirinya menghidupi, menyediakan dan membiayai kebutuhan ekonomi masing-masing daerahnya, serta dapat mengambil keputusan yang efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Sebagaimana diketahui tujuan pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional tersebut, maka Pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program pembangunan baik pembangunan jangka pendek maupun program pembangunan jangka panjang. Dan untuk keberhasilan program pembangunan nasional tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit.

Indonesia merupakan negara yang menganggap bahwa peranan pajak memberikan kontribusi sangat besar dalam menopang

pembangunan nasional. Penerimaan negara dari sektor pajak sendiri pada kenyataannya dari tahun ketahun semakin meningkat dan sejalan dengan hal tersebut peranan pajak sebagai penopang program pembangunan nasional juga semakin meningkat. Ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak ini sudah ada sejak jaman dahulu kala, walaupun saat itu belum dinamakan pajak. Pada jaman dahulu, "pajak" yang dimaksud merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela yang diberikan oleh rakyat kepada rajanya. Besar kecilnya pemberian sukarela tersebut ditentukan atau ditetapkan oleh pihak Rakyat. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi pemberian yang sifatnya dipaksakan dalam arti pemberian tersebut bersifat wajib, dan segala ketentuannya ditetapkan oleh negara secara sepihak.

Pemberian yang bersifat wajib tersebut yang juga biasa disebut dengan upeti. Maka yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan. Namun menurut negara bahwa pungutan yang dikenakan tersebut adalah sesuatu hal yang wajar karena kebutuhan negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara yang meliputi kebutuhan untuk mempertahankan negara dan melindungi rakyatnya dari sreangan musuh, serta untuk melaksanakan pembangunan. Dengan demikian sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik dibidang ekonomi, sosial, maupun kenegaraan. Dan perkembangan

pemungutan pajak tersebut hingga kini yang bernama pungutan tersebut tetap ada, yaitu yang sering disebut dengan pajak. Dimana segala ketentuan tentang pemungutan pajak tersebut tidak lagi ditentukan oleh rakyat atau ditentukan oleh negara secara sepihak namun ditentukan oleh rakyat dan negara secara bersama-sama.

Menurut, Lutfi (2006) Pajak yang merupakan sumber penerimaan negara harus dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan pemerintah. Berdasarkan pemungutannya pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, pajak pusat dan pajak daerah. Dapat di jelaskan pajak pusat dan pajak daerah merupakan suatu sistem perpajakan di Indonesia pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil kepada masyarakat.

Pemerintah daerah harus mampu mengembangkan dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah adalah dengan diperlakukannya pajak daerah dalam rangka menjalankan fungsi dan peraturan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yang dimana masing-masing daerah diminta untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan juga dapat mensejahterakan masyarakat sehingga pemerataan pembangunan baik dibidang sosial, ekonomi, dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu demi masyarakat adil dan makmur, sehingga dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit untuk keberhasilan program pembangunan nasional tersebut.

Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pemungutan. Dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak. Pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor. pajak kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak kendaraan bermotor dalam sektor ini mempunyai prospek yang cukup bagus bagi penerimaan daerah jika dikelola dengan efektif dan efisien. Semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di Kota Gorontalo maka pajak yang diterima oleh pemerintah secara langsung akan berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah yang nanti akan digunakan untuk pembangunan daerah tersebut. Pajak tersebut juga dapat memperbaiki pembangunan ekonomi Kota Gorontalo dengan memperbaiki sarana dan prasarana pembangunan Kota Gorontalo. Dibawah ini merupakan presentase (%) capaian target dan realisasi pajak kendaraan bermotor Di kantor Samsat Kota Gorontalo.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor
di Kota Gorontalo Tahun 2009-2014

Tahun Anggaran	Target	Realisasi
2009	29.350.472.100	29.094.352.800.00
2010	32.550.861.400	37.695.619.718.00
2011	42.153.606.599	46.234.705.090.00
2012	49.604.243.299	54.644.527.740.00
2013	60.289.473.017	64.532.666.168.00
2014	61.543.326.440	58.329.358.027

Sumber data: kantor samsat kota Gorontalo

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa selama lima tahun berturut-turut target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Gorontalo terus mengalami peningkatan. Perkembangan yang terus meningkat ini mencerminkan besarnya potensi yang ada dalam penetapan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Realisasi pajak kendaraan bermotor yang terus mengalami peningkatan ini tentu mempengaruhi besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya. Dalam rangka proses pembangunan yang sedang dihadapi negara Indonesia, setiap daerah di Indonesia berlomba-lomba dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerahnya melalui sektor pajak dimana sektor pajak ini akan memberikan kontribusi yang terus meningkat setiap tahunnya guna meningkatkan sumber dana pembangunan tiap daerahnya masing-masing sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan mengalami peningkatan.

Keterkaitan antara jumlah penduduk, jumlah obyek kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah menjadikan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Semakin besar potensi dan realisasi pajak kendaraan bermotor maka akan semakin besar pula mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerahnya. Tidak terkecuali Kota Gorontalo, merupakan Kota yang memiliki prestasi dalam peningkatan sektor pajak. Berdasarkan data-data yang telah disajikan diatas dapat diketahui bahwa Kota Gorontalo Tengah memiliki potensi besar dalam meningkatkan

realisasi pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah. Potensi ini dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya jika pemerintah dapat mengelola dengan baik sehingga akan mencapai realisasi pajak kendaraan bermotor melebihi dari potensi atau target yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan realisasi pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah dapat mengatur upaya melalui kebijakannya sendiri sehingga dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bagaimana kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Gorontalo.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya pajak kendaraan bermotor di Kota Gorontalo memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan PAD di Kota Gorontalo. Sehubungan dengan itu, target pajak yang terus ditingkatkan setiap tahunnya dan realisasi yang telah dicapai selalu melebihi target yang telah ditentukan bahwa target yang ditetapkan masih jauh dari potensi yang bisa didapatkan sehingga potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor belum optimal. Untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mencoba menguraikan masalah-masalah yang di uraikan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kontribusi sektor-sektor pajak terhadap PAD.
2. Adanya kelemahan sumber daya manusia serta ketidakpahaman tentang mekanisme perpajakan.

1.3. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar kontribusi dan efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD di Kota Gorontalo selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 ?
2. Bagaimana perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Gorontalo selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 ?

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Menganalisis seberapa besar kontribusi dan efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD di Kota Gorontalo selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013
2. Mengetahui perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Gorontalo selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013

1.5. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat, bagi pihak-pihak yang

terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai peran dan kontribusi pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bagi pemerintah dan pihak yang terkait, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah kota Gorontalo dan instansi yang terkait guna meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor di kota Gorontalo di masa yang akan datang.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap proses pembangunan daerah sehingga masyarakat taat dan patuh terhadap hukum pajak dan tidak lalai membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya.
4. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor di waktu yang akan datang